

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang membahas mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman” yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (H1) diterima. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil regresi yang didapat dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yakni nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa lingkup instansi Pemerintahan di Kabupaten Sleman telah menggunakan standar yang berlaku dengan baik.
2. Hipotesis Kedua (H2) diterima. Dengan demikian, kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil regresi yang didapat dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yakni nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa para pegawai, pejabat dan staf menunjukkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai yang mana dapat meningkatkan kualitas LKPD.
3. Hipotesis Ketiga (H3) diterima. sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, artinya bahwa instansi yang memiliki sistem pengendalian yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, sebagian besar tujuan dari penelitian ini sudah terjawab untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. (2022), Rahmiati & Baihaqi (2023), Hafidzah & Tjahjono (2025), Nst dkk. (2024), serta Bestari & Wahyuni (2023) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten Sleman. Ketiga variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian (HA1 dan HA2 diterima).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kendala seperti:

1. Kendala dalam pengumpulan kembali kuesioner yang memakan waktu cukup lama sekitar 2 minggu dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya cuti bersama selama 3 hari.
2. Kendala hilang 2 berkas kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya, sehingga berkas yang kembali berkurang jumlahnya, dikarenakan berkas tersebut hilang.

3. Kuesioner pada hasil normalitas awalnya tidak normal, sehingga perlu dihilangkan *outlier*-nya, sehingga kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan terdapat *outlier* sebanyak 26 kuesioner.
4. Peneliti hanya menyebarkan 5 kuesioner disetiap instansi dinas/badan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta terdapat keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran bagi penelitian selanjutnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, jika menggunakan penyebaran kuesioner sebaiknya memperhatikan waktu dan memperluas lingkup penelitian. Penelitian selanjutnya juga bisa menambahkan variabel independen lainnya untuk mendalami faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya agar dapat menanyakan disetiap dinas/badan terkait jumlah pegawai yang ada di instansi tersebut ada berapa.
2. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Sleman, untuk dapat memperhatikan kebijakan atau aturan dengan memperbaharui kembali terkait SAP yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, dapat dilakukan pelatihan terkait peningkatan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal perlu lebih diperketat kembali terkait evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2021). *Determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Cv. cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Economina*, 2, 1719–1729.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Erlangga.
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>
- BPK.go.id Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Diakses dari PPID-PUSAT
- BPK.go.id. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Diakses dari PPID-PUSAT
- BPK.go.id. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Dearah Kabupaten Kulon Progo. Diakses dari PPID-PUSAT
- BPK.go.id. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Diakses dari PPID-PUSAT
- BPK.go.id. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten Yogyakarta. Diakses dari PPID-PUSAT

Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafidzah, N., & Tjahjono, A. (2025). Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM: Faktor-Faktor Kunci Penentu Kualitas Laporan Keuangan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 7298–7312. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.8862>

Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). BPFE.

Hery, S. E. (2015). *Analisis laporan keuangan*. Media Pressindo.

Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi plus*.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester 1 Tahun 2024

Mangkunegara, A. P. (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*. PT. Refika Aditama.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Mulyadi, M. (2016). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nst, U. R. A., Anggraini, T., & Syafina, L. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(2), 469–479. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.10185>

Peraturan Pemerintah. Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian*

Internal. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>

Rahmiati, K., & Baihaqi. (2023). PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 9(1), 589–602.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Siregar, O. K. (2025). *Akuntansi Sektor Publik*. CV Eureka Media Aksara.

Soetrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Thian, A. (2022). *Analisis laporan keuangan*. Penerbit Andi.



LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN



**FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor: 1126/Pen/I
Lamp.: -
Hal : Ijin Penelitian, Penyebaran Kuesioner

12 Mei 2026

Kepada Yth.
SKPD di Kabupaten Sleman

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Margareta Meiva Wulanjayanti
NPM/Program Studi : 220427158/Akuntansi
No. Handphone : 085799335119

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Permohonan penelitian menggunakan kuisisioner pada Kepala Bagian Keuangan.

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan



Wenefrida Mahestu N. Krisjanti, SE., M.Sc., Ph.D.

Alamat

Kampus III Gedung Bonaventura
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281
Indonesia

URL

<https://fbe.uajy.ac.id/>

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext 3120, 3127
Fax : +62-274-485227
Surel : fbe@uajy.ac.id



Lampiran Surat No. 1126/Pen/I

Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Sleman (Jl Roro Jonggrang No. 2 Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511)
2. Dinas Pendidikan (Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511)
3. Dinas Kesehatan (Jl Roro Jonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511)
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (Jalan Magelang, km 10, Tridadi, Kecamatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55511)
5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Jl Magelang Km.10 Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
6. Satuan Polisi Pamong Praja (Jl Parasamya Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta kode pos 55511)
7. Dinas Sosial (Jl Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
8. Dinas Pemuda dan Olahraga (Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
9. Dinas Tenaga Kerja (Jl Parasamya, Beran, Tridadi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Jl. Rorojonggrang No. 8, Beran, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
11. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Jl. Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, kode pos 55511)
12. Dinas Lingkungan Hidup (Jl KRT Pringgodingrat Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Jl. KRT Pringgodingrat No.3 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55511)
15. Dinas Perhubungan (Jl. KRT Pringgodingrat No. 5 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511)
16. Dinas Komunikasi dan Informatika (Komplek Kantor Bupati Sleman), Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta kode pos 55511)
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY kode pos 55511)
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55511)
19. Dinas Kebudayaan (Jl KRT Pringgodingrat No.11, Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Jl Candi Boko Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
21. Dinas Pariwisata (Jl KRT Pringgodingrat Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)

Lampiran Surat No. 1126/Pen/I

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511)
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Jl Candi Gebang No.1 Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Jl Candi Boko Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511)





Kuesioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan :

Usia :

Lama Bekerja :

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3

☐ S1 ☐ S2

Pengalaman Kerja : ☐ 1 Tahun

☐ 1-5 Tahun

☐ 6-10 Tahun

☐ >10 Tahun

B. CARA PENGISIAN

Terdapat beberapa pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Sehubungan dengan hal ini saya mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dimohon kesediaannya dalam memberikan waktu

dalam memberikan jawaban mengenai pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda ceklist (✓) diantara pilihan jawaban yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) :1

Tidak Setuju (TS) :2

Setuju (S) :3

Sangat Setuju (SS) :4

1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Berilah tanda (✓) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan:

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Relevan					
1	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				
2	Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (<i>feedback value</i>) dan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>).				
3	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.				
4	Informasi yang ada didalam laporan keuangan saya buat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.				
Andal					
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat telah mencerminkan				

	dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan				
6	Informasi yang dihasilkan dari dalam laporan keuangan SKPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan yang bersifat material				
7	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah				
8	Informasi yang dihasilkan dalam laporan SKPD yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu				
Dapat Dibandingkan					
9	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
10	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya tidak menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP				
11	Saya tidak menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun				
Dapat Dipahami					
12	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami				
13	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang telah saya susun di sajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan adanya batas pemahaman para pengguna				
14	Laporan keuangan yang saya buat disusun secara sistematis agar dapat mudah dimengerti				

2. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	PSAP No.1 Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset dan neraca mengakui kewajiban dan ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan				
2	PSAP No. 2 Saya menerapkan basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
3	PSAP No. 3				

	Saya tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)				
4	PSAP No.4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam SKPD yang saya susun telah menyajikan informasi secara lengkap tentang sebagai penjelasan atas pos-pos dalam laporan keuangan				
5	PSAP No. 5 Saya mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepemenguasaannya berpindah, serta saya selalu melaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.				
6	PSAP No. 6 Saya selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai variabel investasi setelah manfaat ekonomi potensi dimasa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.				
7	PSAP No. 7 Saya selalu mencatat atau menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya, dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas				
8	PSAP No. 8 Saya selalu menunjukkan informasi konstruksi terkait ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya				
9	PSAP No. 9 Saya mencatat kewajiban sebesar nilai nominal, serta mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul				
10	PSAP No. 10 Saya selalu mengkoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.				
11	PSAP No 11 Saya menyajikan laporan keuangan konsolidasian untuk periode pelaporan yang sama dengan pelaporan dan memuat terkait jumlah komparatif dengan periode sebelumnya				

12	PSAP No. 12 Saya menerapkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dalam Laporan Operasional di SKPD				
----	--	--	--	--	--

3. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
1	Saya memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas pokok, fungsi, serta uraian tugas sebagai bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran dengan baik				
2	Saya bisa memahami siklus akuntansi dengan baik serta memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang dilakukan dengan baik				
3	Saya bisa memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan baik				
4	Saya selalu membaca dan memahami literatur berupa jurnal akuntansi dan buku referensi akuntansi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dibidang akuntansi				
Keahlian (<i>Skill</i>)					
5	Saya mampu menyusun jurnal atas setiap transaksi dengan tepat serta melakukan pemindahbukuan kedalam buku besar sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku				
6	Saya tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun dan menyajikan Neraca dan laporan realisasi anggaran dengan baik				
7	Saya memiliki kemampuan dalam penyusunan dan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Arus Kas dengan baik				
Sikap (<i>Attitude</i>)					
8	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika profesi dan kode etik selaku seorang akuntan				
9	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan				
10	Saya selalu memberikan keteladanan kepada bawahan dalam bersikap dan bertingkah laku				

	sebagai Bendahara Penerima atau Bendahara Pengeluaran dengan baik				
11	Saya menjaga integritas dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara Penerima atau Bendahara Pengeluaran dengan baik				

4. Variabel Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Lingkungan Pengendalian					
1	Pimpinan selalu menetapkan kebijakan terkait aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas				
2	Pimpinan di SKPD secara terus-menerus melaksanakan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern				
3	Pimpinan SKPD selalu menerapkan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan prosedur atau aturan perilaku				
Penilaian Risiko					
4	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam penerapan sistem akuntansi				
5	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurusi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi				
Aktivitas Pengendalian					
6	Pegawai dan atasan tidak memahami terkait tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengendalian				
7	Seluruh transaksi yang dientri dan diproses dalam <i>computer</i> yaitu seluruh transaksi yang telah diotorisasi				
8	Kebijakan dan prosedur terkait pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan serta diterapkan dengan baik				
Informasi dan Komunikasi					
9	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat				

10	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, serta aparat pengawas internal dalam rangka memberikan masukan yang signifikan				
Pemantauan					
11	Sebagai tindak lanjut atas penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD tidak melaksanakan perbaikan pengendalian intern				
12	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan atau revidi serta saran yang diberikan oleh BPK maupun Inspektorat				
13	Pimpinan selalu melaksanakan revidi dan evaluasi terhadap temuan yang menunjukkan adanya kelemahan serta memerlukan perbaikan				